Kunjungan ke Desa-Desa di Hulu Sungai Malinau November – Desember 2002



Kabar dari

Tim Pengelolaan Hutan Bersama
Hulu Sungai Malinau

No. 12, Maret 2003

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik,

Seperti biasa sekali dalam enam bulan tiba-tiba muncul lagi tim Pengelolaan Hutan Bersama ke desa-desa yang ada di sepanjang Sungai Malinau. Pada kunjungan untuk memantau dan mendiskusi dengan masyarakat pengembangan pengelolaan hutan dan kerjasama masyarakat dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan menonjol beberapa perkembangan. Secara luas masyarakat sudah tahu bahwa izin IPPK akan berakhir, namun di masyarakat belum ada informasi jelas tentang " HPH mini" yang oleh sebagian masyarakat diharapkan sebagai pengganti dari IPPK. Masyarakat punya harapan tinggi tentang program reboisasi (penghijauan kembali) yang dimaksud untuk mengurangi lahan kritis dan memberi usaha jangka panjang untuk masyarakat, namun dalam pelaksanaan masih terjadi banyak kendala. Khusus untuk desa-desa di bagian hulu pengaruh dari pembuatan jalan umum cukup menonjol.

Selain topik ini ada beberapa hal yang kami sempat diskusi dengan masyarkat di masing-masing desa seperti pandangan masyarakat ter-hadap hubungan dengan pemerintah, peran berbagai pihak untuk mencapai suatu kesepakatan dan pentingnya (atau tidak penting) pembuatan Tata Ruang Kabupaten. Pada kunjungan ke beberapa desa kami sempat melibatkan satu orang staf dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bpk. Mathias Henry, sehingga masyarakat sempat menyampaikan banyak harapan (termasuk kadang-kadang keluhan) kepada Bpk. Matias Henry. Tentunya persoalan-persoalan yang disampaikan tidak bisa dijawab langsung oleh dia, tapi menjadi laporan ke instansi-instansi pemerintah.

SELAMAT MEMBACA!

"Demam jati" / Program Penghijauan kembali (reboi-sasi)

Kegiatan penanaman kembali (reboisasi) dengan tanaman jati super oleh PemKab disambut baik oleh masyarakat bahkan dapat disebut terjadi "demam jati". Walaupun program ini belum dapat dilaksanakan di semua desa, tetapi masyarakat di desa yang belum tersentuh oleh program ini pada tahun 2002 bersemangat karena mendengar cerita dari desa tetangga. Salah satu faktor yang mendorong masyarakat ingin terlibat dalam proyek ini, karena diberi bibit dan ada insentif berupa uang persiapan lahan dan penanaman.

Karena masyarakat ingin ikut program ini mereka banyak bertanya tentang prosedur peng-ajuan usulan agar di masa mendatang juga di-ikutsertakan. Di desa di mana kegiatan penghijauan sudah dimulai kami mengamati beberapa kendala. Karena kontrak-tor yang menangani program ini di lapangan ingin bekerja cepat pen-dampingan proses perencanaan dan pelaksanaan di masyarakat kurang sehingga ada beberapa permasalahan, misalnya seperti terjadi tumpang tindih lahan, penanaman di lahan yang mungkin lebih penting untuk penggunaan lain, bahkan sampai kegiatan oleh kontraktor tidak dilanjutkan sampai selesai.

Pencabutan IPPK

Sudah lama beredar issue di tengah masyarakat bahwa izin IPPK akan berakhir dan ternyata pada bulan November 2002 terbit S.K. Bupati dengan jadwal berakhirnya izin IPPK di Kabupaten Malinau. Belum semua masyarakat tahu informasi jelas tentang berakhirnya izin IPPK dan mereka tidak tahu bagaiamana pola pengelolaan hutan setelah berakhir IPPK dan kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan. Ada beberapa tokoh masyarakat menyampaikan bahwa mereka khawatir sebagian masyarakat terlalu menggantungkan penghidupan pada pembagian fee saja dan mungkin tidak siap dengan usaha lain apabila IPPK sudah tidak beroperasi lagi.

Demam HPH mini di masyarakat

Guna mengantisipasi berakhir izin IPPK dan karena sudah ada peraturan daerah sebagian masyarakat meng-harap kegiatan pengelolaan hutan dapat dialihkan ke "HPH mini" (IUPHHK). Namun prosedur untuk memperoleh izin belum diketahui jelas oleh masyarakat, sehingga mereka lebih menunggu dan mengandalkan giat-nya pihak perusahaan. Sebagian masyarakat mengerti bahwa HPH mini beroperasi di areal 50.000 hektar sehingga meliputi wilayah beberapa desa. Kami belum memperoleh informasi sejauh mana ada perunding-

an terinci antar desa-desa yang ingin kerjasama untuk dapat HPH mini terutama untuk mengatur pembagian fee nanti. Kemungkinan besar luas areal dari masing-masing desa yang akan digarap tidak sama, potensi kayu mungkin juga beda dan jumlah penduduk beda sehingga perlu ada kesepakatan bagaimana menentu-kan pembagian fee untuk masing-masing desa.

Pengaruh pembuatan jalan P.U.

Pada saat kegiatan pembuatan jalan umum dari Tanjung Nanga ke Long Alango baru dimulai timbul be-berapa protes dari desa di mana jalan umum direncanakan. Di satu sisi masyarakat di hulu Malinau menilai pembuatan jalan positif karena membuka berbagai peluang: memudahkan transport, kemungkinan ada jalan tembus dari jalan umum ke masing-masing pemukiman, mengharap alat berat dapat meratakan daerah untuk perluasan pemukinan, mengharap dapat fee dari perusahaan kontraktor untuk dinas Pekerjaan Umum dan mengharap dapat bekerjasama dengan perusahaan kayu untuk membuka IPPK.

Namun ada juga dampak negatif seperti adanya demo dan tuntutan fee, terjadi perebutan wilayah hutan karena ingin dapat fee dan kerjasama dengan perusahaan kayu untuk buka IPPK dan ada sebagian masyarakat khawatir hutannya akan rusak. Dampak untuk masyarakat di hilir Malinau disampaikan adalah perubahan mutu air yang mengakibatkan ada keluhan tentang keruhnya air Sungai Malinau.

Hubungan antara Peme-rintah dan masyarakat

Dengan adanya pemekaran kecamatan sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa hubungan dengan pemerintah (baik kecamatan maupun kabupaten) semakin baik. Sebagai akibat dari pemekaran kabupaten dan ke-camatan masyarakat mengatakan bahwa mereka lebih mudah dapat menjangkau kantor-kantor pemerin-tah.

Dengan berlaku otonomi daerah masyarakat punya harapan tinggi terhadap pelayanan pemerintah. Misalnya walaupun kecamatan Malinau Selatan baru diresmikan pada bulan Agustus 2002 masyarakat mengharap kantor dapat memberi semua pelayanan yang dulu diberikan oleh kantor Camat Malinau. Sebagian masyarakat tidak sadar bahwa perlu waktu untuk melengkapi staf dan (pra)sarana terlebih dulu.

Kesepakatan

Dalam pembahasan tentang pan-dangan masyarakat bagaimana memperoleh suatu kesepakatan yang baik kami mencari informasi tentang

kesepakatan di dalam desa, antar desa dan antar masyarakat dengan perusahaan.

Untuk mencapai kesepakatan di tingkat desa masyarakat sebut cukup hanya melibatkan unsur masyarakat itu sendiri. Apabila terjadi perundingan antar desa, misalnya tentang batas desa masyarakat mengutuskan tokoh-tokoh masyarakat dan mengharap keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah terutama diharapkan oleh masyarakat di desa di mana hingga sekarang belum ada kesepakatan tentang batas desa. Beberapa kali dikatakan : "Kalau hanya masyarakat berunding tidak akan selesai. " Dalam proses perundingan dengan perusahaan sebagian tokoh masyarakat menyebut perlu ada pertemuan dengan seluruh masyarakat dulu. Ada dua peran yang diharapkan dari pemerintah (terutama dari PemKab), yaitu sebagian mengharap pemerintah ikut dalam perundingan, sebagian merasa hanya perlu pemberitahuan kesepakatan kepada pemerintah sehingga kalau di kemudian hari timbul konflik pemerintah bisa menjadi penengah.

Tata Ruang

Mengingat bahwa tata ruang senantiasa merupakan salah satu dasar yang mengatur peruntukan wilayah kabupaten Malinau dan karena PemKab sedang merevisi tata ruang yang ada, kami tanya pandangan tokoh masyarakat tentang perlu atau tidak masyarakat dilibatkan dalam proses ini. Walaupun masyarakat tidak pernah dengar tentang proses penyusunan tata ruang sebagian besar menganggap penting masyarakat dilibatkan dalam proses. Sebagian berpendapat bahwa masyarakat seharusnya dilibat sejak awal proses penyusunan tata ruang. Sebagian beranggapan bahwa cukup disebarkan informasi tentang tata ruang yang ditetapkan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mendukung program pembangunan PemKab.

Harapan masyarakat ada bantuan dari pemerintah

Pada kunjungan dan diskusi di Loreh, Adiu, Gong solok dan Batu Kajang Bpk. Mathias Henry dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi BPk. Made Sudana. Dalam diskusi maysarakat sempat menyampaikan berbagai pertanyaan dan harapan mereka terhadap pemerintah. Misalnya masyarakatmengharapkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya, misalnya untuk perluasan perkebunan, pembelian bibit, pembelian peralatan, upah kerja, dan pemberantasan hama. Dana yang diharapkan masyarakat ini apakah berupa bantuan hibah atau berupa pinjaman dengan bunga ringan atau tanpa bunga. Masyarakat juga ingin mendapat petunjuk dan penjelasan

pemerintah mengenai prosedur, persyaratan, dan proses penyaluran dana tersebut.

Masyarakat menanyakan apakah penggunaan dana DR dapat disalurkan langsung kapada masyarakat dan masyarakat yang menentukan jenis tanamannya. Kalau bekerjasama dengan perusahaan apakah masyarakat bisa memilih perusahaan patnernya.

Proyek percontohan (pilot proyek)
Masyarakat mengusulkan ada proyek percontohan yang dilakukan pemerintah untuk program-program yang dilakukan di desa. Masyarakat katanya belum mengerti kalau dikasi teori dan dibagikan buku-buku. Usul masyarakat yang paling mendesak adalah proyek percontohan penanganan penyakit kakao (coklat) dilakukan di Loreh, Tanjung Nanga, dan Gong Solok. Proyek percontohan tanaman perkebunan lainnya merupakan prioritas berikutnya.

Penyediaan penyuluh pertanian lapangan (PPL)
Dalam diskusi yang dilakukan di setiap desa, masyarakat menjelaskan bahwa keinginan mereka terhadap usaha perkebunan menetap dan jangka panjang semakin meningkat dan semakin kuat mengusulkan kepada pemerintah agar dapat terwujud. Dengan demikian masyarakat mengusulkan perlu ada tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berada di tengah-tengah masyarakat.

CIFOR
CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH

Bogor 16680
Telp. (0251) 622-622
Fax. (0251) 622-100
E-mail: cifor@cgiar.org

CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Desa Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang
Jakarta 10065

Atau lewat surat:
CIFOR
PO Box 6596 JKPWB